



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TOTOK MULYONO
2. Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
3. NHK : 801703

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 67.536.000

1. Tanah Seluas 482 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 30.848.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/42 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 36.688.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 125.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET SPIN 1,2 LT / MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 1 KP A/T 113CC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 110 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOTOR, HONDA A1FO2N37MI A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 240.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 432.536.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

432.536.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.